



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARIS RAHMANUDIN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 448030

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.040.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/223 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 810.500.000
2. Tanah Seluas 1429 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah Seluas 7818 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 286.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA STAR Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA STAR Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 34.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 227.796.791

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.589.596.791



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.589.596.791

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.